

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Bali

¹Ni Wayan Widhiasthini, ²Nyoman Sri Subawa, ³Nyoman Sedana,
⁴Ni Putu Intan Permatasari

¹²³⁴Universitas Pendidikan Nasional Denpasar

e-mail: shribawa@undiknas.ac.id

Received: 13 April 2019; Revised: 30 April 2019; Accepted: 14 Mei 2019

Abstract

Community political participation is a political process in an effort to determine state decisions and policies to improve the welfare of the community. This research was conducted in the context of community participation, particularly Jembrana Regency which has a variety of different characteristics of the community. The problems formulated in this study are the factors that become obstacles to community participation in the regional elections of Bali Province. This study uses a quantitative approach with data analysis techniques, namely factor analysis, which aims to find factors that become a barrier for society to choose their governor. The respondents taken were 260 people with stratified proportional random sampling technique, from 5 sub-districts. Data collection techniques are carried out by doing observation, distributing questionnaires, and documentation. The results of the study concluded that the factors that inhibit volunteers in regional head elections are; 1) Not competent, 2) Geographical, 3) Not independent.

Keywords: Community; Political; Voluntarism; Pilkada

Abstrak

Partisipasi politik masyarakat merupakan proses politik dalam upaya menentukan keputusan dan kebijakan negara untuk menyejahterahkan masyarakatnya. Penelitian ini dilakukan dalam konteks partisipasi masyarakat, khususnya Kabupaten Jembrana yang memiliki ragam karakteristik masyarakat yang berbeda. Persoalan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah faktor yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah Provinsi Bali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencermati faktor penghambat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik analisis data yakni analisis faktor, yang bertujuan untuk mengkonfirmasi faktor penghambat masyarakat dalam memilih gubernur. Responden yang diambil sebanyak 260 responden dengan teknik *stratified proportional random sampling*, dan populasi sebanyak 225.725 dari 5 kecamatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, menyebarkan kuesioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor penghambat menjadi sukarelawan dalam pemilihan kepala daerah adalah; 1) Tidak memiliki kompetensi, 2) Geografis, 3) Tidak independen. Kontribusi penelitian adalah memberikan sumbangsih dalam kebijakan kepemiluan terutama dalam mengatasi rendahnya partisipasi masyarakat. Secara konseptual penelitian ini memberikan sumbangsih konsep tentang perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Kata Kunci: Masyarakat; Politik; Kesukarelaan; Pilkada

Link DOI : <http://dx.doi.org/10.31314/pjia.8.1.1-11.2019>

PENDAHULUAN

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif merupakan sebagai strategi pembangunan dan proses penentuan keputusan publik, hal ini sangat bergantung pada kesadaran masyarakat untuk mau melibatkan diri dalam proses pembangunan (Akbar, MF, Suprpto, S & Surati, 2018).

Partisipasi politik masyarakat sangatlah penting dalam mewujudkan proses demokrasi yang ideal sehingga menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Partisipasi pemilih merupakan landasan dan praktek demokrasi yang menjadi tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat secara luas dan berkesinambungan. Namun demikian, partisipasi masyarakat menjadi permasalahan yang sangat prinsip dalam setiap momen pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Jembrana dalam Pilgub 2018. Masyarakat pemilih tidak menggunakan hak pilihnya disebabkan oleh beberapa alasan, diantaranya 1) Aspek geografis, Kabupaten Jembrana memiliki sebaran wilayah yang sangat luas dari segi kewilayahan, 2) Aspek kependudukan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan sangat sulit untuk menjangkau wilayah perkotaan sebagai pusat kota dan pemerintahan, 3) Aspek sosiologis, yang menunjukkan seringnya terjadi ketegangan dari tahap persiapan sampai ke tahap akhir pemilihan walaupun euphoria politik masyarakat Kabupaten Jembrana tidak terlalu tinggi. Fenomena ini terjadi di Kabupaten Jembrana yang menjadi lokus dalam penelitian ini dengan momen pemilihan kepala daerah Provinsi Bali (Pilgub 2018).

Terdapat beberapa penelitian yang menjadi referensi, Putra (2014) menyebutkan

bahwa 63,89% masyarakat Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan tidak memberikan partisipasi politiknya dalam Pemilihan tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah, faktor penyebab masyarakat tidak memilih atau tidak menunjukkan partisipasi politik yang positif adalah; jauh dari Tempat Pemungutan Suara (TPS), lebih mementingkan kebutuhan ekonomi, sikap pesimisme terhadap kandidat yang maju pada Pilgub, sikap apatis terhadap Pilgub, dan lemahnya sosialisasi tentang kandidat yang mengikuti Pilgub.

Penelitian Nur, Taufik, Tahir (2015) tentang perilaku politik pemilih pemula dalam pemilihan presiden tahun 2014, menemukan bahwa faktor penghambat bagi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya adalah kepribadian aktor dan kurangnya sosialisasi. Kepribadian aktor yang dimaksud adalah kepribadian pemilih pemula itu sendiri dalam menunjukkan perilaku politiknya. Pemilih pemula lebih memikirkan pergaulan mereka dibanding mencari tahu tentang keadaan politik yang terjadi sekarang ini. Hasil penelitian

Mustadin (2013) menyebutkan bahwa terdapat empat faktor yang menjadi penentu terjadinya golput di Kota Yogyakarta, (1) faktor teknis yakni faktor pribadi pemilih misalnya pemilih sedang sakit, (2) faktor pekerjaan yakni pemilih tidak mendapatkan izin dari tempat mereka bekerja, (3) faktor administratif diantaranya, tidak terdata sebagai pemilih dan tidak mendapatkan kartu pemilihan, (4) faktor politik diantaranya, ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik dan kandidat yang maju dalam pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teoritis dan melalui wawancara mendalam terhadap Komisi Pemilihan Umum di Kota

Yogyakarta. Penelitian tersebut memberikan inspirasi terkait faktor apa yang menghambat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah Provinsi Bali Tahun 2018 di Kabupaten Jembrana.

Lebih jauh, penelitian yang dilakukan Prasojo (2004) yang menyatakan warga negara yang sama sekali tidak melibatkan diri dalam partisipasi politik disebut apati (*apaty*), yang disebabkan oleh beberapa hal: pertama, adanya sikap acuh tak acuh, tidak tertarik atau rendahnya pemahaman mereka mengenai masalah politik. Kedua, adanya keyakinan bahwa usaha mereka untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah tidak berhasil, ketiga, mereka tinggal dalam lingkungan yang menganggap bahwa tindakan apati merupakan suatu tindakan terpuji. Hasil penelitian *Fenyapwain* (2013) mengemukakan bahwa iklan politik dalam Pemilu memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap partisipasi pemilih pemula atau sekitar 17,30% sedangkan sisanya ditentukan oleh variabel lainnya, seperti faktor lingkungan, keluarga, nilai-nilai sosial yang dianutnya. Penelitian yang dilakukan Bawono (2008) tentang Perilaku Pemilih dalam menggunakan hak pilih menunjukkan bahwa sebagian pemilih yang tidak menggunakan hak pilih karena tidak diberi tahu dan tidak mau tahu, tidak terdaftar sebagai pemilih, bersikap pasif, tidak memahami manfaat Pemilu. Mereka memilih partai dan calon karena pertimbangan ikatan emosional pribadi, organisasi keagamaan, daerah asal calon, kultur atau budaya, dan lebih mempercayai keberadaan partai.

Penelitian yang dilakukan Wahyudi et al (2013) menunjukkan ada hubungan yang positif antara kepercayaan politik dan kepuasan demokrasi terhadap tingkat

partisipasi politik mahasiswa. Semakin tinggi kepercayaan politik dan kepuasan demokrasi, maka semakin tinggi tingkat partisipasi politik mahasiswa, dimana partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik, keikutsertaan masyarakat dalam berbagai proses politik. Suharyanto (2014) dalam penelitiannya menyatakan masyarakat etnis Tionghoa di wilayah Kecamatan Semarang Tengah menentang pilihan politiknya didukung beberapa faktor, antara lain faktor lingkungan, selanjutnya faktor sosiologi yang ada pada masyarakat etnis tionghoa, berdasarkan informasi yang mereka terima melalui media/iklan politik serta pengetahuan yang diperoleh tentang profil partai, figur caleg serta visi dan misi kandidat ternyata berkorelasi dengan kondisi lingkungan dimana mereka tinggal, serta didukung dengan faktor psikologis masyarakat etnis tionghoa sebagian menentukan pilihan politiknya dengan memilih kandidat yang dilihat/dianggap mampu menampung dan memperjuangkan aspirasi mereka sebagai warga etnis Tionghoa.

Mereka yang aktif berpartisipasi dalam bidang politik adalah yang berpendidikan tinggi, status sosial ekonomi atas, tinggal di daerah perkotaan, berjenis kelamin laki-laki, pebisnis dan kaum kulit putih. Sedangkan mereka yang partisipasi politiknya rendah adalah mereka yang berpendidikan rendah, status sosial ekonomi bawah, tinggal di pedesaan, berjenis kelamin perempuan, bekerja sebagai buruh kasar dan kaum kulit hitam.

Penelitian yang dilakukan Arwiyah (2012) mendukung hasil penelitian Haqqi, bahwa status sosial ekonomi berperan dalam meningkatkan partisipasi politik meskipun belum signifikan. Hal ini disebabkan masih terdapat pemilih yang berpendidikan tinggi,

dan berpendapatan mapan kurang percaya terhadap partai politik. Pemilih yang memiliki pendidikan dan pendapatan rendah serta pekerjaan yang kurang mapan, lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan ekonomi terlebih dahulu daripada kehidupan politik. Hambatan geografis juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan Pemilu, seperti hasil penelitian Payapo, et.al. (2014), bahwa faktor geografis mempengaruhi kualitas pemilukada, terbatasnya sarana dan prasarana (perkantoran dan transportasi), kurang tersedianya jaringan listrik dan internet, kurangnya jaringan komunikasi seperti yang terjadi pada Kabupaten Tambaora, Maybrat, Teluk Bintuni, Raja Ampat, Wondama, dan Kaimana. Hal ini semakin dipertegas oleh Subawa & Widhiasthini (2018), dalam penelitiannya bahwa peran media sosial dan teknologi informasi telah merubah perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan dan mengambil keputusan atau tindakan. Dari uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa penelitian ini, membahas tentang fenomena sosial yang terjadi dan perubahan perilaku masyarakat dalam memilih. Beberapa faktor yang terdapat dalam hasil penelitian tersebut, kemudian menjadi rujukan dalam proses dan pembahasan dalam penelitian.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis data yang digunakan adalah analisis faktor. Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Hal ini didasari atas beberapa alasan (1) wilayah geografis Jembrana cukup luas, bagi sebagian masyarakat cukup sulit untuk mengakses pusat Kota Jembrana, (2) partisipasi

masyarakat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2018 tergolong rendah yaitu 69,1% (jika dibandingkan dengan target nasional 77,5%), (3) karakteristik masyarakatnya yang heterogen, ditunjukkan oleh keberagaman sosial dan budaya, dan (4) Jembrana merupakan salah satu pintu gerbang dari Provinsi Bali. Untuk mengetahui jumlah variabel yang dapat diproses lebih lanjut maka ditampilkan tabel Anti Image Matrices.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki hak pilih dalam Pilgub Bali 2018 di Kabupaten Jembrana yang berjumlah 225.725 orang, yang memiliki peran sebagai *volunteer* (kesukarelaan) masyarakat, komunitas, dan kelompok lainnya dalam penyelenggaraan Pilgub Bali. Sampel yang diambil penelitian ini adalah 260 orang, didasarkan pada jumlah variabel yang diuji sebanyak 26 variabel, dan jumlah sampel adalah 5-10 kali jumlah variabel. Penentuan responden/sampel dilakukan dengan teknik *stratified proporsional random sampling* yang artinya peneliti menentukan sampel berdasarkan stratifikasi dan proporsi yang telah ditentukan berdasarkan pekerjaan, usia, status, pendidikan, wilayah (Kecamatan Jembrana, Melaya, Mendoyo, Negara dan Pekutatan). Stratifikasi tersebut digunakan sebagai kriteria untuk menetapkan sampel di masing-masing kelompok dan wilayah tempat tinggal kelompok, yang ditentukan secara acak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Memilih variabel yang layak dimasukkan dalam analisis faktor

Dari pengolahan data, dapat disajikan tabel 1 yang memuat *Kaiser – Meyer – Olkin* (KMO) and *Bartlett's Measure of Sampling Adequacy* (MSA).

Tabel 1. KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.800
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	399.177
	Df	55.000
	Sig.	.000

Sumber : Olahan Data Primer

Tabel 2. Anti Image Correlation

No	Variabel	Anti Image Correlation
1	Tidak adanya motivasi	0,828
2	Tidak memiliki jaringan dalam kepemiluan	0,837
3	Tidak paham alur kepemiluan	0,736
4	Tidak memiliki kompetensi	0,829
5	Tidak adanya kesempatan atau ruang dan waktu	0,877
6	Tidak independen	0,734
7	Tidak memiliki idealisme demokrasi	0,744
8	Aktif sebagai anggota partai	0,747
9	Tidak ada kesamaan persepsi dalam organisasi sukarelawan	0,815
10	Jarak tempat tinggal dan lokasi sukarelawan	0,709
11	Telah memiliki pekerjaan tetap	0,853

Sumber : Olahan Data Primer

Pada tabel 1, dapat diketahui *Kaiser-Meyer-Olkin and Bartlett's Measure of Sampling Adequacy (MSA)* besarnya adalah 0,800 dan nilai signifikansi = 0,000. Oleh karena nilai KMO hasil pengolahan data lebih besar dari 0,5 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka kumpulan variabel tersebut dapat diproses lebih lanjut.

Selanjutnya dilakukan analisis faktor dengan *Anti Image Matrices* yang

digunakan untuk menentukan variabel yang dapat dianalisis lebih lanjut dan variabel yang harus dikeluarkan. Kriteria penentuan *Anti Image Matrices* adalah angka korelasi yang terdapat pada *Anti Image Correlation* (angka korelasi yang berisi tanda "a", yaitu angka yang terletak pada arah diagonal dari kiri atas ke kanan bawah). Bila angka korelasi yang diperoleh sebuah variabel lebih besar dari 0,5 maka variabel tersebut dapat dianalisis.

Berdasarkan data pada tabel 2 dapat diketahui *Anti Image Correlation* kesebelas variabel yang diuji adalah lebih besar dari 0,50. Artinya bahwa kesebelas variabel memiliki nilai *Anti Image Correlation* lebih besar dari 0,5 yang berarti telah memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut.

2. Ekstraksi variabel

Seluruh variabel yang diuji memiliki nilai *Anti Image Correlation* lebih besar dari 0,5 dan seluruh variabel tersebut tidak ada yang dikeluarkan dari analisis. Artinya seluruh variabel memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut. Proses selanjutnya berupa proses faktoring dan ekstraksi, yang ditampilkan pada tabel 3. Data *extraction* pada tabel *communalities* tersebut, menunjukkan deskripsi besaran sebuah variabel, yang dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Dapat dijelaskan bahwa variabel tidak adanya motivasi, angka *extraction* adalah 0,612. Hal ini berarti sekitar 61,2% varians dari variabel tidak adanya motivasi dapat dijelaskan oleh faktor yang nanti terbentuk. Demikian juga, terhadap variabel, yakni tidak memiliki jaringan dalam kepemiluan, angka *extraction* adalah 0,638. Hal ini berarti sekitar 63,8% varians dari variabel tidak memiliki jaringan dalam kepemiluan dapat dijelaskan oleh faktor yang akan terbentuk. Untuk menentukan jumlah faktor yang terbentuk, dapat dilihat dari *Initial Eigenvalue*. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3. Dari data pada tabel tersebut, terbentuk tiga faktor yang memiliki nilai *Initial Eigenvalue* lebih besar dari 1, yaitu faktor pertama memiliki *Initial Eigenvalue* = 4,370 dan faktor kedua = 1,497 serta faktor ketiga = 1,211. Sedangkan 9 faktor lainnya memiliki nilai *Initial Eigenvalue* lebih kecil dari 1. Faktor yang memiliki

nilai *Initial Eigenvalue* lebih kecil dari 1 tidak digunakan dalam menghitung jumlah faktor. Ini berarti jumlah faktor yang terbentuk hanyalah 3 (tiga). Proses penetapan variabel yang akan masuk ke dalam suatu faktor dilakukan dengan membandingkan besarnya koefisien korelasi pada setiap baris. Interpretasi dilakukan dengan melihat faktor *loading* (korelasi) status variabel dengan faktornya. Batasan faktor *loading* minimal 0,5. Bila faktor *loading* sebuah variabel lebih kecil dari 0,5 maka variabel tersebut dikeluarkan dari model.

Selanjutnya mengacu pada tabel 4 *component matrix*, dapat dijelaskan korelasi sebagai berikut.

- Korelasi antara variabel tidak memiliki kompetensi dengan faktor 1 adalah 0,794. Artinya memiliki korelasi sangat kuat.
- Korelasi antara variabel tidak memiliki kompetensi dengan faktor 2 adalah -0,149. Artinya bahwa memiliki korelasi negatif yang lemah.
- Korelasi antara variabel tidak memiliki kompetensi dengan faktor 3 adalah 0,164. Nilai tersebut menunjukkan korelasi yang lemah

Koefisien korelasi (faktor *loading*) pada variabel tidak memiliki kompetensi, memiliki nilai terbesar, dan berada pada faktor 1, maka variabel tersebut bisa dimasukkan sebagai komponen faktor. Pada beberapa variabel terdapat faktor *loading* yang hampir sama besarnya sehingga hal ini menyulitkan untuk memasukan dalam faktor 1, 2 dan 3. Oleh sebab itu akan dilakukan rotasi kembali, agar lebih jelas faktor *loading*-nya.

Tabel 3. Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	4.370	39.732	39.732	4.370	39.732	39.732
2	1.497	13.608	53.340	1.497	13.608	53.340
3	1.211	11.006	64.346	1.211	11.006	64.346
4	.781	7.097	71.443			
5	.688	6.257	77.700			
6	.577	5.243	82.943			
7	.487	4.429	87.372			
8	.407	3.701	91.073			
9	.406	3.687	94.761			
10	.334	3.038	97.799			
11	.242	2.201	100.000			

Sumber : Olahan Data Primer

Tabel 4 Component Matrik^a

	Component		
	1	2	3
Tidak memiliki kompetensi (x4)	.794	-.149	.164
Tidak ada kesamaan persepsi dalam organisasi sukarelawan (x9)	.725	.265	-.147
Tidak adanya kesempatan atau ruang dan waktu (x5)	.697	-.228	-.298
Tidak adanya motivasi (x1)	.679	-.288	.260
Tidak memiliki jaringan dalam kepemiluan (x2)	.675	-.389	.178
Telah memiliki pekerjaan tetap (x11)	.659	-.035	-.492
Tidak memiliki idealisme demokrasi (x7)	.554	.286	.430
Aktif sebagai anggota partai (x8)	.551	.598	.193
Tidak paham alur kepemiluan (x3)	.400	-.590	.334
Tidak independen (x6)	.513	.573	.175
Jarak tempat tinggal dan lokasi sukarelawan (x10)	.587	.032	-.606

Sumber : Olahan Data Primer

Dari hasil proses rotasi yang dilakukan terlihat lebih jelas dan nyata faktor *loading* untuk setiap variabel. Bila faktor *loading* sebelumnya kecil, maka akan menjadi lebih kecil. Jika faktor *loading* sebelumnya besar, maka akan menjadi lebih besar. *Component Matrix*

hasil proses rotasi. Memperhatikan tabel 5, diketahui bahwa 11 variabel penelitian tersebut, telah terbentuk 3 faktor sebagai berikut.

Tabel 5 Rotated Component Matrik^a

	Component		
	1	2	3
Tidak paham alur kepemiluan (x3)	.780	-.011	-.102
Tidak memiliki jaringan dalam kepemiluan (x2)	.738	.274	.136
Tidak adanya motivasi (x1)	.712	.210	.246
Tidak memiliki kompetensi (x4)	.643	.352	.375
Jarak tempat tinggal dan lokasi sukarelawan (x10)	.043	.837	.106
Telah memiliki pekerjaan tetap (x11)	.183	.791	.137
Tidak adanya kesempatan atau ruang dan waktu (x5)	.423	.664	.087
Tidak ada kesamaan persepsi dalam organisasi sukarelawan (x9)	.185	.549	.531
Aktif sebagai anggota partai (x8)	.023	.166	.819
Tidak independen (x6)	.008	.157	.773
Tidak memiliki idealisme demokrasi (x7)	.340	-.015	.677

Sumber : Olahan Data Primer

1. Faktor 1 yang meliputi, tidak paham alur kepemiluan, tidak memiliki jaringan dalam kepemiluan, tidak adanya motivasi dan tidak memiliki kompetensi. Kemudian dari faktor 1 ini dan variabel yang membentuknya maka dapat dilakukan pemberian nama pada faktor 1 adalah tidak paham alur, tidak memiliki jaringan dan tidak berkompotensi.
2. Faktor 2 terdiri atas, jarak tempat tinggal dan lokasi sukarelawan, telah memiliki pekerjaan tetap, tidak adanya kesempatan atau ruang dan waktu dan tidak ada kesamaan persepsi dalam organisasi sukarelawan.
3. Faktor 3 terdiri atas, variabel aktif sebagai anggota partai, tidak independen dan tidak memiliki idealisme demokrasi.
 Hasil proses rotasi matrik, dapat dianalisis bahwa variabel-variabel yang diuji dalam penelitian ini, menunjukkan kejelasan variabel berada pada faktor yang mana dari 3 faktor yang terbentuk. Setiap variabel telah memiliki koefisien korelasi (*loading* faktor) yang kuat dengan salah satu faktor yang terbentuk.

3. Penamaan faktor

Faktor yang merupakan gabungan lebih dari satu variabel perlu diberi nama. Pemberian nama memakai pendekatan *surrogate variable*, yang artinya mencari

dan menemukan salah satu variabel dari setiap faktor yang merupakan representasi dari variabel-variabel tersebut dan pemilihan nama dapat ditentukan pada faktor *loading* tertinggi dan atau nama lain (baru) yang mewakili dan menunjukkan karakteristik perwakilan terhadap kumpulan variabel-variabel tersebut. Penamaan terhadap faktor-faktor yang terbentuk adalah sebagai berikut.

- a. Faktor 1 terdiri atas, tidak paham alur pemilihan, tidak memiliki jaringan dalam pemilihan, tidak adanya motivasi dan tidak memiliki kompetensi. Untuk selanjutnya faktor ini disebut dengan nama “Faktor Tidak Memiliki Kompetensi”. Kompetensi didefinisikan sebagai pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu, dan terlihat pada konteks pekerjaan. Kompetensi ditunjukkan dalam kerja dan perilaku tempat kerja.
- b. Faktor 2 terdiri atas, jarak tempat tinggal dan lokasi sukarelawan, telah memiliki pekerjaan tetap, tidak adanya kesempatan atau ruang dan waktu dan tidak ada kesamaan persepsi dalam organisasi sukarelawan. Untuk selanjutnya faktor ini disebut dengan nama “Faktor Geografis”. Geografis menunjukkan letak suatu wilayah/daerah, secara nyata posisi daerah tersebut.
- c. Faktor 3 terdiri atas, aktif sebagai anggota partai, tidak independen dan tidak memiliki idealisme demokrasi. Untuk selanjutnya faktor ini disebut dengan nama “Faktor Tidak

Independen”. Independen dimaknai sebagai bebas, berdiri sendiri dan merdeka. Jadi, tidak Independen berarti tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, berpihak kepada atau mendukung partai politik tertentu.

Dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 11 indikator yang mempengaruhi penghambat menjadi sukarelawan Pilgub 27 Juni 2018 di Kabupaten Jembrana dapat direduksi menjadi 3 faktor saja. Dari ketiga faktor tersebut dapat diketahui bahwa faktor 1 dengan nama “Faktor Tidak Memiliki Kompetensi” mempunyai pengaruh paling dominan karena memiliki *Initial Eigenvalue* paling besar, yaitu 4,370. Selanjutnya, faktor 2 dengan nama “Faktor Geografis” memiliki *Initial Eigenvalue* sebesar 1,497. Terakhir, faktor 3 dengan nama “Faktor Tidak Independen” memiliki *Initial Eigenvalue* sebesar 1,211.

Dalam penelitian Parawansa (2002) menunjukkan bahwa faktor izin pasangan menjadi penghambat dalam berproses dan partisipasi dalam politik, khususnya para wanita. Artinya, keikutsertaan secara aktif dalam berpolitik melalui media-media yang ada pada era saat ini, forum, jejaring sosial, dan diskusi-diskusi terbatas (Mudjiyanto, 2012). Sesungguhnya, peran aktif semua komponen masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi politik sangat diharapkan. Seperti diuraikan oleh Kusmanto (2013) dalam penelitiannya, bahwa komponen masyarakat melalui peran Badan Permusyawaratan Desa dalam sosialisasi partisipasi politik masyarakat dalam bentuk diskusi, penyuluhan dan pendidikan politik

masyarakat. Miharjo (2014) mengemukakan dan dapat diinterpretasikan bahwa dengan pendidikan politik yang baik dan memahami karakteristik masyarakatnya akan dapat mengurangi persoalan-persoalan dan mengelola konflik sosial di masyarakat. Kompetensi masyarakat perlu ditingkatkan dalam pemahaman pendidikan politik dan dampak yang dapat timbul akibat perbedaan pandangan dan pendapat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat dirangkum dan disimpulkan bahwa faktor penghambat menjadi sukarelawan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) 2018, adalah 1) Faktor Tidak Memiliki Kompetensi, 2) Faktor Geografis; 3) Faktor Tidak Independen, dimana masing-masing faktor merupakan hasil reduksi dari berbagai faktor. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk menjadi kajian pada penelitian-penelitian selanjutnya, seperti: budaya *follower* yang ditimbulkan dari maraknya iklan kampanye di media sosial, hambatan bagi perempuan dalam menggunakan hak politiknya mengingat jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki.

Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah penerapan kebijakan yang tepat dalam upaya meningkatkan partisipasi dan kesukarelaan masyarakat dalam menggunakan hak politiknya dengan memperhatikan kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, MF, Suprpto, S., & Surati, S. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 135-142. doi:<http://dx.doi.org/10.31314/pjia.6.2.135-142.2017>
- Arwiyah, M. Y. (2012). *Status Sosial Ekonomi dan Kualitas Partai Politik*. XXVIII (1), 85-92.
- Bawono, Muhammad (2008) *Persepsi dan Perilaku Pemilih terhadap Partisipasi Politik dalam Pemilihan Umum Legislatif 2004 di Kabupaten Nganjuk*. Universitas Sebelas Maret. Tersedia di:<https://eprints.uns.ac.id/5429/>
- Fenyapwain, M.M. (2013) Pengaruh Iklan Politik dalam Pemilukada Minahasa terhadap Partisipasi Pemilih Pemula di Desa Tounalet Kecamatan Kakas. *Jurnal ACTA DIURNA*. Vol 2, No 1 tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurna/article/view/975>
- Kusmanto, Heri. (2013) Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*. Vol 1, No 1. tersedia di: <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/550>
- Miharjo, S (2014) *Pengaruh Faktor Kompetensi terhadap Strategi Pencegahan Konflik Sosial di Kota Ternate*. Repository Universitas

- Terbuka.
- Mudjiyanto, Bambang (2012) Literasi Internet dan Partisipasi Politik Masyarakat Pemilih dalam Aktifitas Pemanfaatan Media Baru (Survey Masyarakat Pemilih Pilkada, Kasus Masyarakat Bengkulu) *Jurnal Studi Komunikasi dan Media. Vol. 16 (1)*
- Mustadin. (2013). Analisis Potensi Golput pada Pemilu 2014 di Kota Yogyakarta. *Jurnal Psikologi Integratif*, 1(1), pp.175-186
- Nur, R., Taufik, A., Tahir, M. (2015). Perilaku Politik Pemilih Pemula dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden 2014 di Desa Kanaungan Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(1), pp.91-106
- Parawansa, K.I. (2002). *Perempuan di Parlemen. Bukan Sekedar Jumlah, Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*. Academia.Edu
- Payapo, RMT. Ruslan, A. Halim, H. (2014) Penguatan Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dalam Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Analisis*. Vol. 3 No 1. 90 – 100
- Putra, R.D. (2014). Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Tidak Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 di TPS 5 RT 4 RW 1 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan. *Jurnal Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 1(2), pp.1-15
- Prasojo, E. (2004) People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*. academia.edu.
- Subawa, N. S., & Widhiasthini, N. W. (2018). Transformasi Perilaku Konsumen Era Revolusi, *Prosiding. Conference On Management And Behavioral Studies*. ISSN 2541-3406; e-ISSN 2541-285X. p. 131–139.
- Suharyanto, Agung. (2014) Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*. (2) 151-160 tersedia di: <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/920>
- Wahyudi, H., Fernando, T., Ahmad, A., Khairani, A., Agung, I. M., & Milla, M. N. (2013). *Peran Kepercayaan politik dan Kepuasan Demokrasi terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa*.